



PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : PRADYTIA PUTRI PERTIWI
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJA SAMA
3. NHK : 1009194

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.420.000.000

1. Tanah Seluas 80 m² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m²/175 m² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/100 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m²/50 m² di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 106 m² di KAB / KOTA BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
6. Tanah Seluas 150 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m²/32 m² di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
8. Tanah Seluas 130 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 319.000.000

1. MOBIL, HONDA HRV PRESTIGE 1.80 RS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.



19.000.000		
3. MOTOR, HONDA SCOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.		
10.000.000		
4. MOBIL, KIA MORNING Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.		
60.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	225.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	470.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	150.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	3.584.000.000
III. HUTANG	Rp.	234.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.349.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.